

EFEKTIVITAS PELAKSAAN PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Dalles Siahaan

Email : dallespku@gmail.com

Pembimbing : Dr. Zaili Rusli, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Progran Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Unemployment in Indonesia is a difficult problem to eliminate from human life, but the problem of unemployment is not left alone. The high unemployment rate is caused by several factors including the size of the labor force that is not balanced with employment opportunities and the level of education and skills possessed by the people of Indonesia is very low. Pekanbaru City Labor Office implements a program of expanding employment opportunities that is burdened by the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia. The program of expanding employment opportunities implemented by the Pekanbaru City Labor Office is located in Rumbai Subdistrict, because Rumbai Subdistrict is still very minimal and requires the construction of infrastructure or infrastructure facilities and many have unemployed communities that must be empowered. This study provides an overview of community empowerment in reducing the unemployment rate in Pekanbaru city while finding inhibitory factors. Based on the results and discussions of the research can be concluded that the program of expanding employment opportunities is implemented through public services with a budget of the State Budget where the types of activities include labor-intensive infrastructure that aims to seek the expansion of opportunities. This type of research is qualitative research with phenomenological approach. Data collection obtained both primary and secondary data collected through observation interviews and documentation, then analyzed so that it can be drawn conclusions from existing research problems. The result of the study is that the program of expanding employment opportunities is less effective because some indicators of success are not achieved. Inhibitory factors include natural conditions and climate or weather at the time of the implementation of the program so that the program is not carried out properly or not in accordance with the planned time.

Keyword : *Effectiveness, Program Implementation, Expansion of Employment Opportunities*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor pembangunan yang layak mendapat perhatian serius oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan, sektor ini dinilai cukup berpotensi dalam meningkatkan perekonomian rakyat. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat maka perekonomian sebuah negara akan meningkat. Undang-undang ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 39 menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dan bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik didalam maupun diluar hubungan kerja. Selanjutnya pada Pasal 40 Ayat 1 disebutkan perluasan kesempatan diluar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM). Dan pada Pasal 40 Ayat 2 dijelaskan bahwa penciptaan perluasan kesempatan kerja dilakukan dengan pola pemberdayaan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem pola padat karya yang dapat mendorong terciptanya perluasan tenaga kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Penempatan, Dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Perluasan kesempatan

kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 4 Tahun 2013 Pasal 22 ayat 3. Penciptaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, terapan teknologi tepat guna, wira usaha baru, perluasan kerja sistem padat karya, alih profesi, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Masalah ketenagakerjaan umumnya berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan SDM tenaga kerja, rendahnya tingkat gaji, serta jaminan sosial yang hampir tidak ada. Meskipun terlihat adanya usaha dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah ketenagakerjaan ini namun dalam kenyataannya seluruh kebijakan tersebut tidak menyentuh permasalahan mendasar dari berbagai permasalahan pengangguran tersebut.

Berdasarkan upaya mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di berbagai daerah, pemerintah pusat dengan kewenangan yang dimiliki, turut berperan serta mengatasi permasalahan tersebut. Peran melalui Tugas Pembantuan (TP) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Masalah ketenagakerjaan umumnya berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, pada tahun 2020 kota Pekanbaru memiliki penduduk bukan angkatan kerja ada sebanyak 296.031 orang. Dari jumlah tersebut, 34 persen mempunyai kegiatan utama bersekolah, dan 10 persen melakukan hal lainnya. Tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia sebagai tenaga kerja, rendahnya tingkat gaji, serta jaminan sosial nyaris tidak ada. Meskipun terlihat adanya

usaha dari pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah ketenagakerjaan ini, namun dalam kenyataannya seluruh kebijakan tersebut tidak menyentuh permasalahan mendasar tentang tenaga kerja dan pengangguran tersebut.

Kondisi tenaga kerja di Kota Pekanbaru saat ini sangat memprihatinkan, dimana saat ini akibat dari covid-19 banyak tenaga yang di PHK atau pemutusan hubungan kerja. Data dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Pekanbaru, jumlah pekerja yang terkena PHK akibat dampak Covid-19 hampir mencapai 300 orang. Total ada 287 orang karyawan yang terkena PHK selama pandemi Covid-19 melanda. Akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut menambah angka pengangguran yang semakin meningkat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran Terbuka di Kota Pekanbaru

Status	2017	2018	2019	2020
Bekerja	467.	494.	514.	507.
	555	362	200	617
Pengangguran Terbuka	45.	45.	43.	47.
	716	469	865	521
	Jiwa	Jiwa	Jiwa	Jiwa

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk yang bekerja di kota Pekanbaru tahun 2017- 2018 mengalami peningkatan sebesar 26. 807 jiwa, pada tahun 2018-2019 penduduk yang bekerja mengalami peningkatan sebesar 19. 858 jiwa, dan pada tahun 2019-2020 penduduk bekerja mengalami peningkatan sebesar 6.583 jiwa. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui angka pengangguran terbuka di kota Pekanbaru pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 247 jiwa, pada tahun 2018-2019 angka pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 1. 604 jiwa, dan pada tahun 2019-2020 angka pengangguran

terbuka mengalami peningkatan sebesar 3.656 jiwa.

Faktor kemiskinan dapat menghambat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jumlah kemiskinan di Kota Pekanbaru pada 2020 mengalami sedikit peningkatan dibanding 2019. Jumlah penduduk miskin di Pekanbaru sebanyak 28,60 ribu jiwa (2,52 persen) pada tahun 2019. Jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 30,40 ribu jiwa (2,52 persen) pada tahun 2020, atau bertambah 1,8 ribu jiwa.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau mempunyai fungsi dan peranan ganda yaitu sebagai ibukota provinsi, sekaligus Kota Pekanbaru merupakan daerah otonom yang mempunyai daerah sendiri. Sebagai pusat pemerintah tentunya mempunyai kegiatan pembangunan dan menjalankan strategi pemerintahan dengan berbagai bentuk masalah yang harus dihadapi termasuk dibidang perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Untuk menjalankan program perluasan kesempatan kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru pada Tahun Anggaran (TA) 2019 mendapat dana APBN melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk program kegiatan padat karya infrastruktur. Konsep padat karya infrastruktur salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran, sekaligus memacu perkembangan tepatnya di Kota Pekanbaru secara cepat dan tepat sasaran.

Kegiatan padat karya infrastruktur merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran utama adalah masyarakat penganggur dan setengah penganggur. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja/usaha bagi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sarana ekonomi yang telah banyak menggunakan tenaga manusia

dibandingkan dengan tenaga mesin. Sehingga diharapkan mampu menekan angka pengangguran dan setengah pengangguran.

Yang melatarbelakangi program kegiatan padat karya yaitu pemberdayaan tenaga kerja yang pengangguran, setengah pengangguran, sekaligus menambah penghasilan atau pendapatan bagi tenaga kerja, dan dalam program kegiatan padat karya tersebut membantu pemerintah, karena adanya sarana prasarana yang terbangun. Filosofi program padat karya adalah menyerap dan menggunakan tenaga kerja skala besar-besaran.

Tabel 1.2
Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pelaksanaan Padat Karya Infrastruktur di Kecamatan Rumbai tahun 2019

Kelurahan	Kegiatan	Jumlah Orang
Sri Meranti	Padat Karya Infrastruktur	88 orang
Muara Fajar Timur	Padat Karya Infrastruktur	88 orang
Agrowisata	Padat Karya Infrastruktur	88 orang
Rantau Panjang	Padat Karya Infrastruktur	88 orang
Jumlah		352 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja kegiatan padat karya infrastruktur yang dilaksanakan di Kecamatan Rumbai ada 4 Kelurahan yang menjadi tempat dilaksanakannya program padat karya Infrastruktur yaitu Kelurahan Sri Meranti dengan jumlah 88 orang. Kelurahan Muara Fajar Timur dengan jumlah 88 orang. Kelurahan Agrowisata dengan jumlah orang 88 orang. Kelurahan Rantau Panjang dengan jumlah orang 88 orang. Dengan demikian jumlah seluruh tenaga kerja yang dipekerjakan dalam melaksanakan Program Padat Karya Infrastruktur tersebut sebanyak 352 orang. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru jumlah perkelurahan sama banyaknya yaitu 88

orang agar tidak adanya perbedaan atau kesenjangan penyerapan tenaga kerja, dan pembagian tersebut sudah direncanakan sebelumnya oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Alasan jumlah tiap kelurahan sebanyak 88 orang karena sesuai dalam petunjuk pelaksanaan dalam melaksanakan kegiatan.

Fenomena yang terjadi sekarang di Pekanbaru dimana masih banyak masyarakat yang pengangguran. Maka dengan itu adanya program perluasan kesempatan kerja sangat cocok dilaksanakan di Kota Pekanbaru, karena dengan banyaknya SDM yang pengangguran bahkan di PHK dapat dipekerjakan melalui program perluasan kesempatan kerja, tetapi program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur hanya bersifat sementara dalam memberikan lapangan pekerjaan. Dari 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, ada 3 kecamatan yang menjadi sasaran utama kegiatan padat karya infrastruktur, yaitu : Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai, dan kecamatan Rumbai Pesisir. Namun untuk dapat mengetahui bagaimana efektivitas pelaksanaan program kegiatan padat karya infrastruktur ini dalam memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi penunjang akses sosial ekonomi masyarakat, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Rumbai yang pelaksanaannya di 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Agrowisata, Sri Meranti, Muara Fajar Timur, dan Rantau Panjang. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena di Kecamatan Rumbai memiliki masyarakat paling banyak mengikuti program kegiatan padat karya infrastruktur. Dengan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DI KOTA PEKANBARU**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas rumusan yang dibuat oleh penulis mengenai pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur Di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan Bagaimana efektivitas pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur di Kota Pekanbaru ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian efektivitas padat karya infrastruktur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur Di Kota Pekanbaru
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pencapaian efektivitas pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur Di Kota Pekanbaru.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat praktis, akademis dan teoritis yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai referensi Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat Akademis

- c. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi penulis-penulis berikutnya yang membahas permasalahan yang sama. Sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya pada bidang yang sama, dan mengacu pada perkembangan penelitian Administrasi Publik.

2. KONSEP TEORI

2.1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan rasional untuk menciptakan ketetapan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi sehingga memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tuntutan kehidupan masing-masing.

Efektivitas adalah tingkatan sejauh mana tujuan tercapai dan sejauh mana sasaran masalah masalah dapat diselesaikan. Berbeda dengan efisiensi, efektivitas ditentukan tanpa mengacu pada biaya. Efektivitas sama dengan “doing the Right Thing” sedangkan efisiensi “Doing the Thing Right”.

Efisien adalah pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk menghasilkan output (hasil) yang lebih besar. Efisien adalah usaha untuk membuat pengorbanan yang paling tepat untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Sedangkan arti efisiensi adalah sejauh mana waktu, tenaga atau biaya yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) dalam Maharani Permata Sari Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu

organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Siagian (2003 ; 20) dalam Yudistira Yola Saputra memberikan pengertian Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Hal ini dapat disederhanakan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dapat diselesaikan pada waktunya.

Menurut Agung (2005 ; 109) dalam Yudistira Yola Saputra mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan melaksanakan tugas. Fungsi (Operasi Kegiatan Program atau Misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pandangan yang sama menurut pendapat Drucker yang dikutip Moenir (2006 ; 166), Mendefinisikan efisiensi yaitu, kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu yang benar merupakan konsep input-output. Semua pengelolaannya efisien merupakan salah satu yang mencapai output atau hasil, yang mengukur sampai dengan input (tenaga kerja, Bahan dan Waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan). Sedangkan Drucker juga memberikan pengertian efektivitas yaitu pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang sesuai.

Menurut Handoko (2001: 7), dalam Yudistira Yola Saputra Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, jika sarana atau tujuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka suatu pekerjaan dikatakan tidak efektif.

Menurut Sedarmayanti (2009:109) dalam bukunya “transformasi pelayanan publik” dikutip dalam oleh Rini Andriani mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “ Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau gangguan diantara pelaksanaannya.

Mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan.
5. Perubahan Nyata

Menurut (Sutrisno,2007:125-126) dalam Rini Andriani Efektivitas program dapat diukur dengan melihat sejauh mana pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan pendapat masyarakat penerima bantuan program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program.

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya” Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu

Sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau keduanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka

akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68) "Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan".

Menurut Tjokroadmudjoyon (2014:12) "Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek". Menurut Wiestra, dkk (2014:12) "Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat

pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Abdullah (2014:151) "Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Nawawi (2009:95) Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Webster dalam Wahab (2005:64) pelaksanaan atau implementasi secara pendek berarti penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu, menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Jika dilihat makna implementasi berarti suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

2.3. Program

Menurut Arikunto (2014:4) dalam Rini Andriani menambahkan bahwa program merupakan suatu sistem, dimana rangkaian kegiatan dilaksanakan tidak hanya satu kali namun berkesinambungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program merupakan sederetan kegiatan yang

dilaksanakan lebih dari satu kali namun berkesinambungan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nawawi (2007:174) dalam Rini Andriani mengemukakan pendapatnya bahwa program dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Program-program disusun dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Sujianto (2008:32) dalam Pujiyati program adalah suatu kompleks dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan untuk melaksanakan arah tindakan tertentu.

Menurut Charles O. Jones dalam Amalia (2009:295) pengertian program adalah cara yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu :

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program biasanya juga diidentifikasi melalui anggaran.
3. Program memiliki identitas, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

2.4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sujianto (2009:15) dalam Pujiyati konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja, keadilan dan

keberlanjutan. Dengan demikian pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut.

1. Sedangkan menurut Usman (2003 :40) dalam Pujiyati ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat yaitu: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kedalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja dan pasar.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian digunakan agar penelitian berjalan dengan baik, sistematis serta tercapainya hasil penelitian yang diharapkan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa upaya penting dalam pengumpulan data, seperti pengajuan pertanyaan dalam bentuk wawancara mengenai program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Pengumpulan data yang telah didapatkan dan mengkategorikan sesuai panduan wawancara yang telah dibuat peneliti. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel, siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan

cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan suatu persoalan.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru yang menjadi pembuat dan mengatur program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur tersebut, dan juga kecamatan Rumbai sebagai sasaran dari program perluasan kesempatan kerja. Adapun pertimbangan pemilihan lokasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja di kota Pekanbaru.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu pihak-pihak yang paham atau yang mengetahui tentang penelitian ini. Informan penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling adalah penetapan informan penelitian dengan orang-orang yang mengetahui dan memiliki informasi terkait program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya tersebut, karena pada dasarnya informan selalu berurusan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

Adapun informan penelitian yang penulis tetapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Status Informan	Jumlah
1	Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1
2	Seksi Penempatan Dalam dan Tenaga	1

	Kerja Asing	
3	Masyarakat dan Perangkat Kantor Kecamatan Rumbai, Kelurahan Rantau Panjang, Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kelurahan Agrowisata	4

1. Kepala Bidang Penempatan Kerja.
Abdul Rahim, SP. MMA
2. Kepala seksi Penempatan Kerja Pelaksanaan Program Padat Karya.
Budi Hartono, SE
3. Masyarakat serta perangkat Kantor Kecamatan Rumbai, Kelurahan Rantau Panjang, Kelurahan Sri Meranti, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kelurahan Agrowisata.

3.4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan masyarakat Kecamatan Rumbai. Hasil data primer yaitu : waktu pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja di Kecamatan Rumbai tepatnya di 4 (empat) kelurahan. Jumlah tenaga kerja yang ikut berpartisipasi di 4 (empat) kelurahan tersebut. Panjang dan lebar jalan atau infrastruktur yang di bangun. Manfaat yang diperoleh masyarakat dari kegiatan padat karya infrastruktur yaiitu, memudahkan masyarakat dalam bersosial. Masyarakat juga pendapatannya semakin meningkat, dan juga berdaya atau tidak pengangguran lagi.

b. Data Sekunder

Data sekunder di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, seperti : data jumlah angka pengangguran di Kota Pekanbaru. Dokumentasi pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dari sosial media. Petunjuk

pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur dan juga petunjuk teknis kegiatan padat karya infrastruktur.

3.5. Teknik Pengambilan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Pengamatan secara langsung ke Kecamatan Rumbai sebagai sasaran Program Perluasan Kesempatan Kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru untuk melihat bagaimana pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan melalui tanya-jawab dengan informan penelitian menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Hasil wawancara yang diterima dari informan kemudian dianalisis dan dipahami dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Data berupa efektivitas pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau sumber tertulis yang peneliti peroleh bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, Kantor Kelurahan Rantau Panjang, Kelurahan Muara Fajar Timur, Kelurahan Agrowisata, Kelurahan Sri Meranti berupa file pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur. Data berupa gambar pada saat pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.

d. Studi Pustaka

Data yang diperoleh dari karya ilmiah berupa peneltian terdahulu tentang efektivitas pelaksanaan proram, data studi pustaka dari media massa berupa pemberitaan kapan dan dimana

pelaksanaan program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman dengan menggambarkan data yang didapatkan sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan teknik analisis data ini diharapkan mampu mengkaji permasalahan sehingga mampu menghasilkan temuan baru. Adapun langkah-langkah dalam analisis data deskriptif kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu : data reduction, data display, dan conclusion drawing? verification.

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Dalam tahap ini peneliti merangkum kembali semua data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data melalui survey, wawancara, dan juga dokumentasi, studi pustaka. Data yang telah diperoleh kemudian dirangkum dan dikategorikan dan membuang data yang tidak sesuai dengan fokus dari penelitian ini sehingga pada akhirnya mampu mendapatkan temuan baru.

2. Data Display (Penyajian Data)

Data yang telah dirangkum dan disesuaikan dengan fokus penelitian kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan berupa “uraian singkat” sehingga semakin memudahkan untuk memahami data yang diperoleh. Pada tahap ini peneliti juga memastikan kembali tidak ada penting yang tertinggal. Setelah penyajian data selesai dilakukan maka peneliti melakukan pengolahan data ke tahap selanjutnya.

3. Conclusion Drawing /Verification

Pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi data sehingga didapatkan makna yang mampu menjawab rumusan masalah dari penelitian ini

dan mampu menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Efektivitas Pelaksanaan Program Perluasan Kesempatan kerja

4.1.1. Ketetapan Penentuan Waktu

Pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memiliki lebih 8 (delapan) sampai 14 (empat belas) hari dalam melakukan kegiatan padat karya infrastruktur . Kegiatan telah terlaksana sesuai apa yang ada di Petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan hanya selama 8 (delapan) hari sebagai standar operasional pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur. Dan dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program berasal dari APBN yang dimana Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru yang mengelola semua anggaran untuk melaksanakan program padat karya infrastruktur Kota Pekanbaru, tepatnya Di Kecamatan Rumbai. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program padat karya di kecamatan rumbai sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

4.1.2. Ketepatan Perhitungan Biaya

Waktu sudah diperhitungkan sebelum melaksanakan program, karena diketahui pelaksanaan program sudah selesai sebelum bulan desember atau akhir tahun. Biaya dalam pelaksanaan program sudah diperhitungkan sebelum melaksanakan program dan juga memberdayakan tenaga kerja dalam memberikan biaya selama tenaga kerja melakukan kegiatan. Namun disini peneliti menemukan bahwa pada saat wawancara pihak Dinas Tenaga Kerja tidak transparan dalam menyampaikan berapa jumlah dana APBN yang dikucurkan dari pusat secara keseluruhan untuk program perluasan

kesempatan kerja. hal ketepatan perhitungan biaya yang dilaksanakan dalam program perluasan kesempatan kerja tidak efektif karena masyarakat hanya menerima gaji setelah masyarakat selesai melakukan kegiatan setiap harinya. Masyarakat tidak mengetahui berapa banyak biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program. Masyarakat tidak memiliki lagi lapangan pekerjaan atau pemberdayaan masyarakat tidak berkelanjutan setelah selesai program perluasan kesempatan kerja tahun 2019, karena biaya yang diberikan atau anggaran yang ada hanya untuk gaji tenaga kerja pada saat melakukan kegiatan.

4.1.3. Ketepatan Dalam Pengukuran

Pelaksanaan program melalui kegiatan pembangunan infrastruktur harus diukur sebelumnya. Dari segi waktu pelaksanaan kegiatan, dari segi biaya yang dibutuhkan, segi tenaga kerja yang diserap atau diberdayakan harus sesuai dengan pedoman atau petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam indikator ketepatan pengukuran ini, baik dari waktu, biaya, dan tenaga kerja yang terlibat masih kurang efektif dikarenakan waktu untuk memberikan kesempatan kerja, lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat terbilang singkat. Waktu dalam pelaksanaan kegiatan tidak melebihi apa yang telah diukur atau direncanakan sebelumnya, yaitu tidak lebih dari 14 hari dan selesai sebelum akhir tahun, terlepas dari faktor penghambat pelaksanaan program. Biaya yang dianggarkan di setiap kelurahan dalam kegiatan masyarakat hanya cukup untuk masyarakat yang bekerja kurang lebih sekitar 14 hari. Tenaga kerja yang ikut melaksanakan kegiatan cukup melaksanakan sesuai waktu yang direncanakan.

4.1.4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur. Rencana program perluasan kesempatan kerja sasaran utamanya adalah para tenaga kerja yang pengangguran, dalam setiap rencana inilah ditentukan dan dipilih untuk bagaimana dalam penyarapan tenaga kerja yang banyak.

Ketepatan dalam menentukan pilihan cukup baik dalam hal memperluas kesempatan kerja karena banyak menggunakan tenaga manusia atau menyerap tenaga manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena itu sangat memberdayakan masyarakat, namun hal ini kurang efektif jika melihat kedepannya, karena tenaga kerja yang diserap dalam melakukan kegiatan ini akan kembali pengangguran lagi setelah kegiatan ini selesai dilaksanakan, karena penyerapan tenaga kerja bersifat sementara.

4.1.5. Ketepatan Berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal. Ketepatan berpikir sangat vital dalam pelaksanaan program serta kegiatan agar masyarakat tahu apa yang menjadi tujuan program serta menghasilkan hasil yang maksimal. Pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur ini kurang efektif dalam aspek pemberdayaannya karena pemberdayaannya hanya sementara atau tidak terus-menerus, dalam artian, selesai kegiatan padat karya infrastruktur ini, maka selesai juga masyarakat diberdayakan dan atau masyarakat hanya

memiliki pekerjaan yang sifatnya sementara.

4.1.6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan untuk memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang disampaikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang dapat merugikan organisasi. Ketepatan dalam melakukan perintah sangat penting karena apa yang disampaikan dari Kementerian Ketenagakerjaan dari mulai perencanaan dan pelaksanaan sesuai sampai ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Perintah yang disampaikan dari atas atau Kementerian Ketenagakerjaan melalui petunjuk pelaksanaan dan juga petunjuk teknik dalam melakukan padat karya infrastruktur, dapat diterima oleh bawahan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur ini melalui indikator ketepatan dalam melakukan perintah cukup terealisasi dibuktikan bahwa adanya penyerapan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur semakin bertambah, dan pendapatan masyarakat bertambah.

4.1.7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui kegiatan padat karya infrastruktur ini penyerapan tenaga kerja dapat meminimalisir angka pengangguran, dan adanya lapangan pekerjaan, sehingga memperluas kesempatan kerja bagi yang pengangguran dan setengah pengangguran. Pembangunan infrastruktur juga bertambah. Pelaksanaan

padat karya ini melalui indikator ketepatan dalam menentukan tujuan cukup maksimal, hanya saja setelah selesainya kegiatan tenaga kerja yang diserap tadi hanya sementara memiliki pekerjaan, karena jika kegiatan padat karya infrastruktur selesai, maka para tenaga kerja kembali menganggur, dan ini merupakan hal yang kurang efektif dari segi pemberdayaan masyarakat yang pengangguran.

4.1.8. Ketepatan Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri. Sasaran utama dari program perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan padat karya infrastruktur yaitu tenaga kerja yang pengangguran, setengah pengangguran, yang di PHK dan juga penduduk yang memiliki KTP yang berdomisili di setiap kelurahan dilaksanakannya program tersebut. Pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan padat karya infrastruktur ini cukup positif karena memperluas kesempatan kerja, mengurangi tenaga kerja pengangguran, menambah pendapatan masyarakat, serta meningkatnya pembangunan di empat kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai yang mempermudah kegiatan sosial ekonomi masyarakat disana. Namun kurang efektif dalam mengatasi angka pengangguran secara berkelanjutan karena sifatnya hanya sementara, artinya tenaga kerja yang pengangguran diberdayakan yaitu pada saat kegiatan padat karya infrastruktur ini berjalan.

4.2. Faktor-faktor Penghambat dalam Pencapaian Efektivitas Pelaksanaan Program Perluasan Kesempatan Kerja

4.2.1. Situasi Alam

Situasi alam mempengaruhi pelaksanaan padat karya infrastruktur tersebut, karena pada saat pelaksanaan padat karya infrastruktur sulit untuk dijangkau karena akses untuk menuju lokasi pembangunan infrastruktur masih dalam kategori daerah pinggiran atau minim pembangunan. Kondisi ini dijumpai pada saat pengantaran pasir dan batu guna pengerasan jalan atau infrastruktur yang baru dibuat dengan menggunakan mobil besar atau truk sehingga sulit untuk masuk ke daerah jalan yang baru dibangun tersebut, keterangan ini disampaikan pada saat wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, dan perangkat kelurahan Muara Fajar Timur juga menyampaikan hal yang sama yaitu pak Siman.

4.2.2. Cuaca dan Iklim

Kondisi cuaca mempengaruhi pelaksanaan padat karya infrastruktur tersebut. Musim hujan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan padat karya infrastruktur yaitu harus berhenti untuk melakukan kegiatan padat karya infrastruktur dan melanjutkan keesokan harinya. Kondisi ini di jumpai di Kelurahan Muara Fajar Timur, kegiatan pembangunan infrastruktur yang harusnya dapat selesai 10 hari, karena hujan pembangunan selesai jadi 12 hari. Keterangan ini disampaikan oleh masyarakat yaitu Buk Minaswati.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru tentang program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur kota Pekanbaru, maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil riset ini menemukan bahwa program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya infrastruktur kurang efektif. Hal ini diketahui dari beberapa indikator keberhasilan efektivitas tidak memenuhi atau tidak termasuk kriteria yaitu :
 1. Ketepatan dalam menentukan pilihan, seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penyerapan tenaga kerja atau pemberdayaan masyarakat hanya bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, karena yang namanya program harus berkelanjutan.
 2. Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan utama dari program ini merupakan perluasan kesempatan kerja bagi yang pengangguran namun hasil penelitian lapangan pekerjaan yang dibuat dari program ini bersifat sementara, karena jika kegiatan selesai dilaksanakan maka lapangan pekerjaan akan hilang dan kesempatan untuk bekerja tidak berkelanjutan.
 3. Ketepatan sasaran, sasaran utama dari program ini yaitu tenaga kerja yang pengangguran. Tenaga kerja yang pengangguran yang terlibat dalam pelaksanaan padat karya akan kembali menganggur karena program akan berakhir sesuai apayang direncanakan yaitu pada akhir tahun dan belum tentu untuk tahun kedepannya berlanjut karena di rencana untuk tahun-tahun kedepannya tidak ada dibuat.
2. Hasil riset ini menemukan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan padat karya infrastruktur ini yaitu :
 1. Situasi alam mempengaruhi pelaksanaan padat karya infrastruktur tersebut, karena pada saat pelaksanaan padat karya infrastruktur sulit untuk dijangkau karena akses untuk menuju lokasi pembangunan infrastruktur

masih dalam kategori daerah pinggiran atau minim pembangunan. 2. Kondisi cuaca mempengaruhi pelaksanaan padat karya infrastruktur tersebut. Musim hujan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan padat karya infrastruktur yaitu harus berhenti untuk melakukan kegiatan padat karya infrastruktur dan melanjutkan keesokan harinya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang program perluasan kesempatan kerja melalui padat karya infrastruktur di Kota Pekanbaru, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pada program perluasan kesempatan kerja untuk tahun berikutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru diharapkan agar para tenaga kerja yang telah ikut melaksanakan program agar terus diberdayakan dalam meningkatkan skill dalam hal pembangunan dan atau dalam bentuk apapun, sehingga para tenaga kerja tidak hanya sebagai pekerja sementara saja atau pada saat adanya program.
2. Dinas tenaga kerja Kota Pekanbaru diharapkan agar memberikan atau menyediakan lapangan pekerjaan walaupun program telah selesai dilaksanakan, sehingga dapat menampung masyarakat yang pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Rini. 2018. Efektivitas Proram Peningkatan Produksi Hasil Peratnian Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. 1-14.
- Creswell, J. W. 2016. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dahlia, D., Bahtiar, B., & Amir, M. Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Kebijakan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Konawe Selatan. Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 8(2).
- Fariani, F., Dirlanudin, D., & Ismanto, G. (2014). Efektivitas Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan di Kota Cilegon (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Lizard, R.S., Kimbal, M, & Lopian, M. 2017. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado. 1-11.
- Lubis, R., & Hidayat, A. (2020). Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. Jurnal Taxiway, 2(1), 11-18.
- Makmur. 2011:7-9. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung : Pt Refika Aditama.
- Mangerongkonda, Y., Rompas, W., & Mambo, R. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Desa Didesa Bawo Kecamatan Tagulandang Utara Kabupaten Kepulauan Sitaro. Jurnal Administrasi Publik, 5(74).
- Meilinawati, D. T. (2018). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Padat Karya Di Kecamatan Magelang Utara. JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara. 1-13.
- Mingkid, G.J., Liando, D., & Lengkong, J. 2017. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan. 1-11.
- Moelong. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya.
- Nasila, J.W. 2014. Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat

- (PDMPPM), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu. 1-12.
- Nordianti. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam (UED-SP) Cemerlang Desa Dompas Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 1-15.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2013 Tentang Pelayanan, Penempatan, Dan Perlindungan Ketenagakerjaan Provinsi Riau.
- Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja.
- Priansa, D.J. & Garnida, A. (2013). Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. Bandung: Alfabeta.
- Pujiyati. 2017. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) di Kecamatan Rumbai Pesisir. 1-14.
- Rahliadi, Arza. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Dana (Block Grand)/ alokasi Desa Di Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 1-8.
- Rahaju, T. (2007). Implementasi Program Padat Karya: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Program Padat Karya di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur. Jurnal Demokrasi. 1-16.
- Rama Dian, Tiara, & Farid Maruf, Muhammad. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Publika, 1-6.
- Raya, U.D. 2019. Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya di Kota Pekanbaru.
- Saputra, Y.Y. 2016. Efektivitas Tugas Pembantuan (MEDEBEWIND) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus Pada Program Pertanian. 1-16.
- Sari, R.M. 2015. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki. 1-8.
- Sedarmayanti. 2009:109. Transformasi Pelayanan Publik.
- Siagian, Sondang. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinambela, Poltak Lijian. 2006. Reformasi Pelayanan Public (Teori Kebijakan Dan Implementasi)Jakarta : Bumi Aksara.
- Soeaidy, M.S. 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Angka Pengangguran di Kabupaten Sampang.
- Steers, Richard. 1985. Efektivitas organisasi. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Alfabeta.Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Rafika Aditama.
- T. W. Kurnia, A. Iskandar, D. Hernawan (2019). Efektivitas Program Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Miskin (KK MISKIN) Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. 1-10.
- Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
- Windari, E.N. 2014. Efektivitas Pelaksanaan Program Kesehatan Lingkungan pada UPTD Kesehatan Kari Kabupaten Kuantan Singingi. 1-15